



April

## Tarif Air PDAM Naik 18 Persen ✓

Negara (Bali Post) -

Mulai April 2015, tarif air minum PDAM Jembrana naik 18 persen. Penyesuaian tarif ini berdasar Peraturan Bupati Jembrana, nomor 5 tahun 2015 tentang penetapan tarif air minum. Kenaikan ini baru dilakukan, setelah lebih dari lima tahun tarif air minum tidak naik dengan sejumlah pertimbangan. Kondisi tersebut mengakibatkan beban operasional lebih tinggi dibanding pemasukan.

Direktur PDAM Ida Bagus Kerta Negara, dikonfirmasi Jumat (27/3) kemarin membenarkan adanya penyesuaian tarif yang diberlakukan mulai April. Penyesuaian baik untuk kelompok sosial, rumah tangga, niaga dan industri berkisar 18 persen. Untuk sumber air perpompaan (menggunakan listrik) dari Rp 1.600 per kubik

menjadi Rp 2.200 per kubik. Sedangkan air bersumber dari gravitasi, awalnya Rp 1.400 menjadi Rp 2.000 per kubik.

Kerta Negara mengatakan penyesuaian tarif air ini akan dibarengi dengan kualitas dan kuantitas pelayanan PDAM. Penyesuaian ini menurutnya perlu setelah bertahun-tahun tidak mengalami penyesuaian, sehingga beban operasional pun menjadi masalah. Peralnya, hampir 87 persen sumber air PDAM menggunakan sumur bor. Sementara biaya listrik terus mengalami kenaikan setiap tahun.

PDAM menurutnya juga telah menyebarkan brosur terkait penyesuaian tarif itu kepada pelanggan ketika membayar tagihan. Begitu halnya pemberitahuan kepada kantor desa dan kecamatan. "90 persen pelanggan kami adalah

kelompok rumah tangga dan sosial, sisanya sekitar tiga persen perusahaan," tambahnya. Sementara rata-rata penggunaan rumah tangga berkisar 17 kubik per bulan atau sekitar Rp 33 ribu untuk tarif baru.

Dengan jumlah pelanggan dan tingkat penggunaan, hanya dua kantor unit yang mampu menutupi beban operasional yakni di Gilimanuk, Kecamatan Melaya dan Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo. Dua daerah itu karakteristik warganya memang sepenuhnya menggantungkan air dari PDAM. Berbeda dengan daerah lain yang memiliki alternatif seperti sumur bor dan sungai. Penyesuaian tarif ini telah disepakati DPRD dan Bupati Jembrana, dengan berbagai persyaratan, salah satunya peningkatan dalam pelayanan terhadap pelanggan. (kmb26)

Edisi : Jenin, 30 Maret 2015

Hal : 17



APBD Meningkatkan

# Dewan Soroti Naiknya

## Penduduk Miskin

Amlapura (Bali Post) -

Meski APBD 2015 Karangasem meningkat tajam, jumlah penduduk miskin juga meningkat. Hal ini disoroti Ketua Fraksi PDI-P di DPRD Karangasem I Gede Dana, Sabtu (28/3) lalu. "APBD tahun ini sudah mencapai Rp 1,2 triliun, tahun sebelumnya Rp 1,1 triliun. Kenapa jumlah penduduk miskin justru meningkat?" ujarnya.

Gede Dana mengatakan, sorotan atas meningkatnya jumlah penduduk miskin juga disampaikan DPRD Karangasem pada rekomendasi strategis terkait laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) masa akhir jabatan Bupati Karangasem I Wayan Geredeg/Wabup Made Sukerana, Jumat (27/3) lalu. Saat itu, anggota DPRD Ketut Badra, S.Pd. membacakan LKPJ yang ditandatangani Ketua DPRD Nengah Sumardi yang menyoroti masih banyaknya penduduk miskin di Karangasem. Kenyataan itu tak sesuai dengan yang disampaikan Bupati, angka kemiskinan menurun. "Pemerintah diharapkan segera menurunkan jumlah penduduk miskin. Penggepeng dan penyakit sosial lainnya agar mendapatkan penanganan lebih optimal dengan membantu mereka keluar dari kemiskinan baik melalui pelatihan keterampilan kerja, serta penyediaan lapangan pekerjaan," ujar Badra.

Menurut Gede Dana, kondisi masyarakat Karangasem selama ini memang tak seperti yang dilaporkan Bupati Karangasem. Tiap kali berbicara soal penduduk miskin, Bupati Karangasem selalu mengatakan

jumlah penduduk miskin sudah jauh menurun dan Karangasem sudah terbebas dari kabupaten tertinggal. Padahal, kenyataannya sesuai data dari Biro Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin diketahui meningkat. Data BPS tersebut akhirnya diakui Bupati Karangasem Wayan Geredeg dan Ketua Bappeda Ketut Sedana Merta. Sesuai data BPS persentase penduduk miskin di Karangasem meningkat dari 5,15 persen menjadi sekitar 7 persen atau dari 17.000 menjadi 22.000 jiwa.

Gede Dana mengatakan, pihaknya kerap turun ke masyarakat dalam rangka kunjungan atau undangan sembari menyerap aspirasi masyarakat. Langsung menginap di rumah penduduk miskin. Terakhir Sabtu (28/3) menginap di rumah Komang Ada di Banjar Untalan, Desa Jungutan. Warga itu benar-benar miskin, gubuknya berdinding gedek berlantai tanah. Dia belum pernah mendapatkan bantuan. Kondisi tetangganya, lebih baik namun bisa dikatakan kondisi perekonomiannya sama dengan Komang Ada. "Itu baru di satu banjar. Di banjar lainnya seperti warga di Canguwang Desa Bunutan, di

sejumlah wilayah desa di Kecamatan Kubu, kondisi penduduk miskinnya memprihatinkan. Mereka perlu dicarikan jalan keluar dengan kerja setulus hati," harapnya.

Gede Dana mengatakan, penggepeng dari sejumlah desa di Karangasem juga masih banyak berkeliaran. Buktinya hasil tangkapan Satpol PP dari kabupaten/kota lain dan dikembalikan ke Karangasem. "Kita tak perlu malu mengakui mereka warga Karangasem," ujarnya.

Kata dia, yang terpenting kini bagaimana mencarikan

Edisi : Senin, 30 Maret 2015

Hal : 15



Sambungan



Bali Post/dok

**PENANGANAN OPTIMAL** - *Harapan dewan, penyakit sosial seperti gepeng agar mendapatkan penanganan optimal dari pemerintah mengingat masih adanya tangkapan Satpol PP yang dikembalikan ke Karangasem.*

jalan keluar masyarakat agar nantinya terbantu dan tak lagi hidup dalam kemiskinan. "Di tengah kemiskinan penduduk yang memprihatinkan, kalau ada musibah seperti terkena tanah longsor, rumah terbakar seperti musim lalu, hendaknya mereka dibantu pemerintah. Pencairan bantuan bagi korban bencana alam hendaknya dilakukan lebih cepat, jangan menunggu beberapa bulan akhirnya mereka terlupakan," katanya.

Gede Dana mengatakan, penduduk miskin yang belum memiliki rumah layak huni juga mesti dibantu. Bantuan bedah rumah masih perlu ditingkatkan. "Saat ini banyak keluhan atau kecemburuan. Soalnya, ada masyarakat yang tak perlu dibantu, tetapi karena kedekatan justru mendapatkan

bantuan. Sebaliknya KK miskin yang tak memiliki kedekatan dengan birokrasi, tak ada yang menolong," katanya.

Atas sorotan itu, Bupati Geredeg menyampaikan bahwa rekomendasi menyangkut berbagai hal termasuk angka penduduk miskin yang meningkat itu cukup bagus. Catatan dan rekomendasi itu nantinya dijadikan masukan dan acuan dalam penyusunan program kerja selanjutnya.

Menurutnya, soal jumlah penduduk miskin yang dikatakan meningkat perlu juga ditelusuri lagi. Soalnya data dari BPS tanpa alamat dan nama siapa yang dikatakan miskin. "Benarkah angka penduduk miskin di Karangasem meningkat. Padahal, pertumbuhan ekonomi juga meningkat menjadi sekitar 6,5 persen. (013)



## Kasus Art Center

# Pagi Ini Terpidana akan Dijebloskan ke Lapas Kerobokan

Denpasar (Bali Post) -

Tim jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani perkara Art Center Denpasar telah melayangkan surat panggilan kepada terpidana kasus dugaan korupsi Art Center, Ketut Suastika (mantan Kadis Kebudayaan Bali) dan Ketut Mantara Gandhi (Kepala UPT Taman Budaya). Hal itu dibenarkan Kasipenkum Humas Kejati Bali Ashari Kurniawan, Minggu (29/3) kemarin.

Sebagai eksekutor adalah Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar. "JPU telah memanggil secara patut dan sah dua terpidana kasus korupsi di Art Centre Denpasar itu. "Kami telah mengirim surat pemanggilan kepada kedua terpidana agar datang ke Kejari Denpasar untuk menjalankan putusan Pengadilan Tipikor yang telah berkekuatan hukum tetap," ujarnya.

Pihak kejaksaan telah menyiapkan berita acara (BA) pelaksanaan putusan pengadilan untuk menjalani pidana penjara tersebut. Terpidana Ketut Suastika dengan pidana penjara 14 bulan dan Mantara Gandhi dengan pidana penjara 13 bulan. "Dengan ditandatanganinya BA pelaksanaan putusan itu, kedua terpidana direncanakan dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan

(Lapas) Kerobokan untuk menjadi warga binaan di sana," sebut Ashari.

Sementara kuasa hukum terpidana, Haposan Sihombing, yang dimintai konfirmasi mengaku sudah berkoordinasi dengan timnya. "Dari Pak Ngastawa bilang bahwa Pak Suastika dan Mantara Gandi sudah menerima surat dari kejaksaan, Kamis lalu," katanya, Minggu kemarin.

Dia mengatakan, terpidana kasus Art Center itu didipanggil, Senin (30/3) pagi ini, untuk menjalani eksekusi, kemudian dijebloskan ke dalam Lapas Kerobokan.

Sebelumnya, majelis hakim pimpinan Cening Budiana memberikan diskon dari tuntutan JPU yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan satu tahun enam bulan.

Vonis yang diberikan pun cukup ringan, yakni satu tahun dua bulan (14 bulan) dengan denda Rp 100 juta subsidair 2 bulan kurungan untuk terdakwa Suastika. Sedangkan Mantara Gandi divonis 13 bulan penjara dan denda Rp 50 juta. (kmb37)

Edisi : Senin, 30 Maret 2015

Hal : 3



Korupsi BBM ✓

## Penahanan Sueca Antara Tak Perlu Izin Gubernur

Negara (Bali Post) -

Surat yang dikirim Unit III Tipidkor Sat Reskrim Polres Jembrana terkait penahanan tersangka anggota DPRD Jembrana I Made Sueca Antara alias Dek Cok, dalam kasus dugaan korupsi BBM bersubsidi di UD Sumber Maju dibalas Gubernur Bali. Dalam balasan surat tersebut untuk kasus Sueca Antara yang masuk sebagai kasus pidana khusus tersebut, tidak perlu menggunakan izin Gubernur.

Kasat Reskrim AKP Gusti Made Sudarma Putra, didampingi Kanit III Tipikor Sat Reskrim Ipda I Putu Merta, Minggu (29/3) mengatakan dalam balasan tersebut, Gubernur menyampaikan aturan baru, yakni UU nomor 17 tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD tersebut. Dari aturan baru tersebut, untuk pidana khusus, seperti korupsi, terorisme,

atau ancaman hukumannya seumur hidup, tidak ada wewenang dari Gubernur, kecuali pidana umum.

Sementara itu terkait penahanan Sueca Antara, Sudarma Putra mengatakan pihaknya belum berani memastikannya. Karena masih ada beberapa tahapan yang perlu dilalui. Seperti menunggu disposisi dari pimpinan atau Kapolres. Apalagi surat baru diterima dan masih di meja Kapolres. "Nanti setelah dari Pak Kapolres, baru ke sini," ujarnya.

Pihaknya juga masih menunggu penetapan dari PN Negara tentang penyitaan barang bukti berupa SK Sueca Antara sebagai anggota Dewan. Permohonannya baru dimasukkan ke PN Negara. "Nanti setelah turun, baru kita kasi ke Kejaksaan, untuk melengkapi. Setelah itu baru bisa menjawab kapan akan ditahan," tandasnya. (kmb)

Edisi : Senin, 30 Mei 2015

Hal : 14



# Penanganan Kasus GOR Nusa Penida Dipertanyakan

Semarapura (Bali Post) -

Penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan GOR Nusa Penida hingga kini belum rampung. Hasil penyelidikannya belum memperlihatkan perkembangan berarti. Padahal, penyelidikan oleh pihak Kejari Klungkung sudah dilakukan sejak awal tahun lalu.

Lambatnya perkembangan penyidikan kasus ini pun dipertanyakan Ketua DPRD Klungkung Wayan Baru, Minggu (29/3) kemarin. Ia mengaku sempat mengapresiasi penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan. Bahkan, puluhan orang yang terkait dengan pembangunan itu juga sudah sempat diperiksa. Kejari Klungkung Cabang Nusa Penida juga sempat menjelaskan sudah menemukan kerugian negara dan sedang menghitung kepastian angkanya, bekerja sama dengan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan). Namun, setelah itu belum ada lagi perkembangan dari kasus ini. Apakah penyelidikan kasusnya masih berlanjut atau sudah dihentikan.

"Sejak tahun lalu saya dengar sudah ditemukan kerugian negara, kenapa sampai sekarang penyelidikan belum naik ke penyidikan dan ada tersangkanya," kata Baru.

Ia meminta pihak Kejaksaan membuka secara gamblang kasus ini. Ia melihat banyak pihak yang mestinya bertanggung jawab atas mangkraknya pembangunan GOR Nusa Penida sejak dibangun tahun 2009. Kasus ini harus segera dituntaskan. Setelah itu, barulah legislatif bisa mendorong pemerintah daerah, untuk melanjutkan *finishing* GOR itu agar bisa dimanfaatkan masyarakat setempat. Baik untuk kegiatan pembinaan olahraga, maupun kegiatan tertentu yang memerlukan tempat seperti GOR.

Kacabjari Nusa Penida I Dewa Made Mertayasa, Minggu (29/3) kemarin, menyampaikan penanganan kasus GOR Nusa Penida masih dalam tahap penyelidikan. Saat ini, Cabjari Nusa Penida terus berkomunikasi dengan pihak BPKP, untuk menemukan angka riil kerugian negara. Ia bahkan mengaku tidak menemukan kesulitan apapun. Ia menegaskan, perlu waktu untuk

menghitung kerugian negaranya. "Kami masih bekerja, kasusnya masih lidik, belum ada tersangka," katanya.

Pembangunan GOR ini sudah menghabiskan Rp 2,3 miliar. Antara lain bersumber dari APBN dari Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2009 sebesar Rp 1,5 miliar, kemudian di tahun 2010 dari APBD Provinsi Bali Rp 200 juta, APBD Kabupaten Rp 65 juta dan APBD Perubahan Rp 500 juta. Pembangunannya dilakukan secara swakelola. Seluruh panitia pembangunan GOR, sesuai dengan surat keputusan Camat Nusa Penida Nomor 001.01/01 SD 5/2009, tanggal 6 April 2009, antara lain; sebagai penanggung jawab, Camat Nusa Penida saat itu I Made Sudiarkajaya, Ketua KUPT Disdikpora kala itu I Ketut Wiadnya.

Kemudian, Sekretaris Dewa Gede Suamba (unsur pendidik), Bendahara Wayan Karnata (unsur PGRI) I Ketut Sukla (unsur kecamatan). Sementara sebagai anggota, dari berbagai tokoh masyarakat Nusa Penida. Di antaranya I Komang Sumendra, Wayan Misna, Wayan Supartawan, Made Kastika, Wayan Sutama dan Made Sukarta. (kmb31)

Edisi : Senin, 30 Maret 2015

Hal : 16



Soal Reklamasi Teluk Benoa

# KLH Tak Sependapat

## dengan Menteri Susi

**Jakarta (Bali Post) -**

Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) memastikan proses amdal reklamasi Teluk Benoa masih sangat jauh untuk mencapai kesimpulan akhir layak atau tidak. Komisi Penilai Amdal (KPA) pusat juga menjamin akan bersikap objektif dan bebas dari tekanan. Namun, Ke-

publik. "Jadi masih tahap mengakomodasi kepentingan masyarakat dan dari pihak pemrakarsanya," kata Imam, Minggu (29/3) kemarin.

Imam yang juga Ketua KPA Pusat mengungkapkan, sesuai UU No.32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), serta PP No.27

mi yang dimasukkan dalam amdal. Dan amdal itu bukan segala-galanya, karena hasil kajian kita juga bisa keliru. Pertanyaannya adalah bagaimana membangun Teluk Benoa dengan baik dan benar. Bagaimana menata itu, banyak sekali hal yang perlu dilakukan," katanya.

**Hal. 23**  
**Kerangka Acuan**

men KLH tak sepakat dengan Menteri Susi Pudjiastuti bahwa harus ada lahan pengganti sesuai dengan luas lahan yang direklamasi.

Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian KLH Imam Hendargo Abu Ismoyo menjelaskan hingga saat ini tahapan dari rencana reklamasi Teluk Benoa masih dalam tahapan konsultasi

Tanun 2012 mengenai izin lingkungan, banyak tahapan amdal yang harus dipenuhi antara lain adanya konsultasi publik yaitu penjelasan kepada masyarakat baik yang pro maupun kontra, kajian dari tim pakar, akademikus, dan lainnya.

"Kajian itu juga meliputi bermacam hal seperti kajian fisik, teknologi, sosial, ekono-

Edisi : Senin, 30 Maret 2015

Hal : 1



Sambungan...

### Kerangka Acuan

#### Dari Hal. 1

Imam mengungkapkan rencana reklamasi Teluk Benoa baru mendapat izin prinsip dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dan saat ini, pemrakarsa telah mengajukan proposal berupa kerangka acuan penyusunan reklamasi yang masih akan diteliti oleh tim teknis dari KPA Pusat. "Dan, saya menjamin betul bahwa teman-teman kita ini memiliki integritas," tegasnya.

Mengenai perlunya lahan pengganti yang luasnya sesuai dengan lahan yang akan direklamasi untuk keseimbangan seperti yang diminta Menteri KKP Susi Pudjiasuti, Imam mengatakan pada prinsipnya lahan reklamasi dengan lahan pertambangan merupakan dua hal berbeda. "Itu kalau reklamasi galian tambang. Kalau reklamasi pantai tentu berbeda. Untuk galian tambang memang ada keharusan, di

mana lahan yang dtambang itu harus ditutup kembali sesuai dengan ekosistem yang ada," kata Imam.

Oleh karena itu, menurutnya, reklamasi tidak harus diidentikan dengan kerusakan lingkungan. "Kalau mereklamasi, bagaimana menjaga lingkungan yang direklamasi, agar jangan sampai terumbu karang lahan yang direklamasi menjadi hilang. Kalaupun (terumbu karang) harus dihilangkan berarti harus dicari lahan pengganti terumbu karangnya, tetapi kalau nggak, ya... harus dijaga bahkan ditambah banyak agar tidak hilang," imbuhnya.

Soal adanya keterlibatan pengusaha besar dalam rencana reklamasi ini, Imam mengaku tidak menampik adanya lobi dari pihak-pihak tertentu agar menyukseskan proyek pembangunan yang diupayakannya. Oleh karena itu, dia juga mengaku dapat memahami kekhawatiran pihak-pihak yang keberatan

Edisi : Senin, 30 Maret 2015

Hal : 23



Senin Ini

MASALAHKAN KPK

# Tiga Tersangka Praperadilan KPK

Jakarta (Bali Post) -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (30/3) ini akan menghadapi sidang perdana gugatan praperadilan yang dilayangkan tiga tersangka. Mereka adalah mantan Menteri Agama Suryadharma Ali, mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo serta mantan Direktur Pengolahan PT Pertamina Suroso Atmo Martoyo.

Plt. Pimpinan KPK Johan Budi SP, Minggu (29/3) kemarin mengatakan, KPK siap menghadapi praperadilan itu. Untuk menghadapi praperadilan tersebut, KPK telah menyiapkan beberapa strategi untuk mematahkan argumentasi dan dalil hukum yang dimohonkan tiga tersangka. "Untuk bukti pendukung kami sudah siap dan jawabannya sudah siap. Makanya kami akan hadir. Sedangkan untuk perkara yang masih memerlukan persiapan tentu pengadilan bisa memberikan kesempatan untuk menunda persidangan," imbuh tim Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang.

Selain itu, KPK juga telah mengerahkan sebanyak 13 orang jaksa yang terdiri atas 10 orang dari satgas penuntutan dan 3 orang jaksa dari bidang koordinasi supervise (korsup). Mereka bergabung membantu tim biro hukum dalam menghadapi sidang gugatan besok (hari ini).

Atas berbagai persiapan yang dilakukan, KPK pun mengaku optimis dapat memenangkan tiga gugatan yang dilayangkan para tersangka kasus dugaan korupsi tersebut. "Sebagai manusia kita harus optimis," tandas Johan Budi, mantan juru bicara KPK tersebut.

Secara terpisah, menanggapi banyaknya sidang praperadilan Senin ini, Humas PN Jakarta Selatan Made Sutrisna menyatakan tidak melakukan persiapan khusus seperti meminta bantuan agar ruang sidang dan area pengadilan dijaga ratusan aparat polisi seperti pada saat menggelar sidang praperadilan Komjen Pol. Budi Gunawan. "Persiapan secara khusus tak ada. Kita lihat persidangan besok saja kalau gitu. Yang kita prediksi sih sidang Suryadharma Ali ada banyak massa," kata Made.

Kendati demikian, jika situasi menjadi tak kondusif, pihak pengadilan secara cepat akan meminta bantuan langsung kepada pihak aparat kepolisian. "Ya, nanti tinggal koordinasi saja (kalau butuh aparat keamanan)," tuturnya.

Untuk diketahui, pascaputusan hakim tunggal Sarpin Rizaldi yang memenangkan Komjen Pol. Budi Gunawan, satu per satu para tersangka kasus korupsi menggugat KPK.

**Hal. 23  
Mantan Menag**

**SURYADHARMA ALI**

Tersangka perkara kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013 di Kementerian Agama.



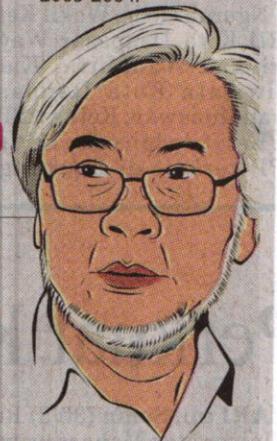
**HADI PURNOMO**

Tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan seluruh permohonan keberatan Wajib Pajak atas SKPN PPh Badan PT BCA Tbk tahun 2003-2004.



**SUROSO ATMO MARTOYO**

Tersangka kasus dugaan suap pembelian zat tambahan bahan bakar Tetra Ethyl Lead (TEL).



grafis: asd/BaliPost

## Mantan Menag

**Dari Hal. 1**

Adapun yang melkukan praperadilan ialah mantan Ketua Komisi VII DPR-RI Sutan Bhatogana (dinyatakan gugur karena perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan); mantan Menteri Agama Suryadharma Ali, tersangka perkara kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013 di Kement-

terian Agama; mantan Ketua BPK Hadi Purnomo, tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan seluruh permohonan keberatan Wajib Pajak atas SKPN PPh Badan PT BCA Tbk tahun 2003-2004; serta mantan Direktur Pengolahan PT Pertamina Suroso Atmo Martoyo, tersangka kasus dugaan suap pembelian zat tambahan bahan bakar Tetra Ethyl Lead (TEL). (wnd)

Edisi : Senin, 30 Maret 2015  
 Hal : 1, 23